

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Tesis
Program Magister Ilmu Hukum
Semester Ganjil 2018

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARIMUN YANG TERBIT SEBELUM DITERBITKAN/DISAHKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NPM: 16115214
Maryeni Defrita

ABSTRAK

Undang-undang merupakan instrumen penting dalam suatu negara. Undang-undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam menyusun suatu perda harus bersumber dari aturan di atasnya sehingga ia tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis impiris, penelitian hukum yuridis impiris mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif pada setiap hukum tertentu. Yaitu mengkaji tentang Undang-undang Penataan Ruang dikaitkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun yang diterbitkan sebelum Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyusunan rencana tata ruang, menurut UUPR pasal 25 ayat (1) Penyusunan Perda Rencana Tata Ruang Kabupaten harus mengacu kepada rencana tata ruang provinsi dan rencana tata ruang nasional. terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Ditemukan ketidak sesuaian pada peta pola ruang dan peruntukan hutan antara Kabupaten Karimun dengan Provinsi Kepulauan Riau, sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.

Kata kunci : RTRW dan kepastian hukum

